

Fenomena Industri Prostitusi Dalam Perspektif Subaltern

Bambang Mudjiyanto¹, Launa^{2*}, Hayu Lusianawati³

¹Universitas Bung Karno, Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

^{2,3}Universitas Sahid, Jl. Prof. Dr. Soepomo, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

*launa@usahid.ac.id

ABSTRACT

Prostitution is a historical phenomenon that has long historical roots in Indonesia, starting from the era of feudalism, colonialism, to the current independence. In the feudal era, women were positioned in a patriarchal casteist social system. This social construction successfully made women a subaltern entity. In the colonial era, the practice of commodification and commercialization of prostitutes was still limited by the supremacist values of European liberalism. Prostitutes were still positioned as legal subjects that must be protected. In the Japanese colonial era, the commodification and commercialization of prostitutes was more sadistic and brutal, not only seen as sexual objects, but as sex slaves of Japanese fascism. This qualitative study with a historical approach found that, in the academic realm, the phenomenon of prostitutes will always be relevant to study. This is because various structural problems in the era of independence still position women as a marginalized social class, still trapped in the shackles of the capitalist system. Negotiating legal status, redefining the legality of the profession, articulating the civil, political and socio-cultural rights of prostitutes, and reconstructing their existence as informal economic actors who contribute to sustaining the rate of national economic growth, are some of the academic questions that must be considered in the future..

Keywords: Capitalism, Colonialism, Commercialization, Comodification, Feudalism, Prostitution, Subaltern

ABSTRAK

Prostitusi adalah fenomena historik yang memiliki akar sejarah panjang di Indonesia, dimulai dari era feodalisme, kolonialisme, hingga ke kemerdekaan saat ini. Di era feodalisme, perempuan diposisikan dalam sistem sosial kastaistik berwatak patriarki. Konstruksi sosial ini sukses menjadikan perempuan sebagai entitas subaltern. Di era kolonial, praktik komodifikasi dan komersialisasi perempuan lacur masih dibatasi nilai-nilai supremasi liberalisme Eropa. Perempuan lacur masih diposisikan sebagai subyek hukum yang wajib dilindungi. Di era kolonialisme Jepang, komodifikasi dan komersialisasi perempuan lacur berlangsung lebih sadis dan brutal, tak cuma dilihat sebatas obyek seksual, namun sebagai budak seks fasisme Jepang. Kajian kualitatif dengan pendekatan sejarah ini menemukan, di ranah akademis, fenomena perempuan lacur akan selalu relevan untuk dikaji. Sebab, berbagai problem struktural di era kemerdekaan saat ini masih memosisikan perempuan sebagai kelas sosial marjinal, yang terjebak dan membisu dalam belenggu sistem kapitalisme. Menegosiasi status hukum, meredefinisi legalitas profesi, mengartikulasi hak-hak sipil, politik, dan sosial budaya perempuan lacur, serta merekonstruksi eksistensinya sebagai aktor dari sektor ekonomi informal yang kontributif dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional, adalah beberapa pertanyaan akademis yang ke depan mesti ditimbang.

Kata-kata Kunci: Feodalisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Komersialisasi, Komodifikasi, Prostitusi, Subaltern

Korespondensi: Launa. Universitas Bung Karno. Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A, Menteng, Jakarta Pusat 10310

No. HP, WhatsApp: 081213801971 | **Email:** launa.ubk@gmail.com

Submitted: Desember 2024 | **Accepted:** Januari 2025 | **Published:** Januari 2025

P-ISSN 2620-3111 | E-ISSN 2685-3957 | Website: <https://ejournal.unma.ac.id>

PENDAHULUAN

Pekerja seks komersial (PSK) adalah fenomena sosial yang selalu hadir dalam sejarah peradaban manusia. Keberadaan dan usia entitas ini diperkirakan sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Prostitusi adalah jenis bisnis (transaksi) jasa yang beroperasi dengan logika sederhana: mempertemukan kepentingan produsen (PSK) yang berniat menjual tubuh dan menawarkan jasa kenikmatan sesaat dengan kebutuhan lelaki ‘hidung belang’ sebagai konsumennya. Pada bisnis jasa ‘*esek-esek*’ ini, produsen dapat secara bebas menjual atau menawarkan jasa kenikmatan tubuh atas dasar alasan ekonomi, tuntutan gaya hidup, penyaluran hasrat seksual, atau alasan lain. Aturan utamanya sederhana: asal si penjaja jasa (PSK) tidak melanggar dan merugikan hak pengguna (konsumen)-nya; syukur-syukur si PSK bisa memberi *service* lebih pada pelanggannya.

Salah satu alasan utama untuk seorang pelacur untuk memasuki bisnis adalah daya tarik untuk meraih uang secara cepat. Survei *The Jakarta Post* tahun 2012 melaporkan, pelacur kelas atas di Jakarta dapat meraup pendapatan Rp 15 juta–Rp 30 juta (USD 1.755–3.510) per bulan. Para pelacur yang beroperasi di Jakarta—dan kota-kota besar lain, seperti Yogyakarta, Surabaya, Bali, Bandung, dan Batam—bahkan bisa meraup pendapatan bersih 2,5 hingga 3 juta per hari untuk setiap sesi transaksi (Tampubolon, 2010). Data Havocscop menyebut, bisnis prostitusi di Indonesia masuk urutan ke-12 dunia. Nilai perputaran bisnis *esek-esek* ini diperkirakan mencapai USD 2,25 miliar per tahun atau sekitar Rp 32 triliun. Urutan teratas diduduki oleh China dengan nilai transaksi sebesar USD 73 miliar, Spanyol USD 26,5 miliar, Jepang USD 24 miliar, Amerika Serikat USD 14,6 miliar, Belanda USD 800 juta, dan Jerman USD 18 juta (Al Hikam, 2019). Perputaran bisnis prostitusi di Indonesia berubah drastis sejak hadirnya teknologi media sosial dengan ragam platform, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line atau Telegram; dilengkapi aplikasi khusus *chatting* mesum, seperti Tinder, Bumble, MeChat, WeChat, MeetMe, Tantan, BeTalk, Badoo atau Hago (Sindonews.com, 2019).

Fenomena prostitusi yang berjalan seiring dengan maraknya pertumbuhan industri seks (mulai dari prostitusi yang berciri offline-konvensional hingga ke era online-virtual saat ini) tentu tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang prostitusi itu sendiri, terutama industri prostitusi yang tumbuh bersamaan dengan masuknya kapitalisme-kolonial di Hindia Belanda. Pembentukan identitas sosial (kelas sosial-ekonomi, ras, etnis, gender, dan seksualitas) PSK masa itu terkait dengan posisinya selaku kelompok subaltern. Ketidaknormalan interaksi nilai dan relasi sosial seksualitas perempuan pribumi di era kolonial dihuni oleh dua sub kelompok utama: ‘gundik’ (atau *nyai*) dan ‘pelacur lepas’.

Gundik (atau *nyai*) adalah “Perempuan pribumi yang memiliki peran ganda, tidak hanya mengurus rumah tangga para tuan kolonial, tetapi juga tidur dengannya; dan dalam banyak kasus menjadi ibu kandung dari anak-anaknya” (Baay, 2017: 1), Sementara pelacur lepas adalah eksekusi yang tumbuh seiring kebijakan ekonomi liberal pemerintah kolonial Hindia Belanda (1870), akibat masuknya modal swasta Belanda yang berinvestasi di sektor perkebunan. Kebijakan ini membutuhkan tak hanya asupan tenaga kerja baru, namun juga perempuan pribumi sebagai tempat pelampiasan hasrat seksual para elite perkebunan Belanda dan para mandor pribumi. Dari sinilah muncul analisis ‘*supply and demand*’ dalam teori prostitusi. Analisis ini hadir seiring geliat pertumbuhan ekonomi di negara-negara pascakolonial (Abalahin, 2003: 88; Jones, dkk., 1995).

Pada tahun 1852, aktivitas prostitusi mendapat legitimasi dan dukungan penuh rezim pemerintah kolonial Belanda melalui kebijakan bisnis prostitusi dengan serangkaian aturan untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti menugaskan polisi untuk mengawasi aktivitas prostitusi dan rumah bordil; atau memberi kartu kesehatan dan memeriksa kesehatan PSK secara rutin. Regulasi ini adalah bentuk kontrol penyebaran penyakit kelamin sekaligus registrasi dan lokalisasi PSK. Pengawasan ini akhirnya membentuk stigma PSK sebagai ‘sumber penyakit moral masyarakat’ yang harus diawasi (Usdi, 2022). Stigma adalah hasil konstruksi sosial yang berpotensi mendiskreditkan dan merusak identitas individu atau kelompok. Persepsi negatif pada PSK—yang profesinya dianggap menyimpang—inilah yang dalam studi poskolonial disebut sebagai strategi reduksi identitas, perendahan status, dan pendiskualifikasian stratum PSK dari normalitas sosial dan penerimaan masyarakat (Goffman, 1963: 3).

Pada sisi lain, studi poskolonial melihat kehadiran industri seks dan para aktornya tak bisa dilepaskan dari logika modernitas, yakni hedonisme dan konsumtifisme gaya hidup. Modernitas—yang bersumber dari tradisi masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara—memberi ruang penuh pada otonomi dan kebebasan individu sebagai upaya rasional manusia untuk membebaskan diri dari tradisi mitis-dogmatis sebagai penghalang kemajuan, sekaligus mempromosikan pesona *idea of progress* (kebebasan dan kesejahteraan hidup manusia) sebagai orientasi dan nilai dasar yang harus dicapai oleh setiap individu (Venn & Featherstone, 2006: 55-57).

Sejarah memberi catatan bahwa praktik prostitusi (yang menelusuk jauh hingga ke era prostitusi online saat ini) adalah residu sosial yang berlangsung masif di sentra-sentra modernitas kota, khususnya di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Temuan riset Ingleson (1986), Jones, dkk (1995), Hull (1997), Setiawan (2018), dan Suud (2019)

mengonfirmasi bahwa fenomena prostitusi adalah gejala modernitas yang mendasari hadirnya praktik prostitusi di Indonesia yang eksis dan menguat hingga saat ini. Sebagai negeri pascakolonial, wilayah perkotaan dan wilayah pesisir Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dan *traffic* sosial yang padat, eskalatif, dan dinamis. Kehidupan kota metropolitan yang penuh sesak dicirikan oleh sifat individual, liberal, kompetitif, dan konsumtif praktis telah memicu masalah sosial baru, yakni merebaknya praktik prostitusi, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, eskalasi urbanisasi, hingga ke problem kriminalitas dan premanisme yang kian tak terpecahkan.

Sejarah panjang perjalanan modernitas sejak lama telah mengeliminasi nilai-nilai tradisional yang berciri lokalis, statis, dogmatis, mitis, dan komunal sekaligus mereproduksi nilai baru yang berciri individual, rasional, liberal, konsumtif, transaksional, padat modal, dan *well technologies*. Berbagai ciri modernitas itu menyatu dalam apa yang dikenal sebagai ‘wajah ambigu modernitas’. Dengan kata lain, praktik prostitusi adalah dampak residual dari anomali sosial yang menyatu dalam ruang hidup modernitas kota kelas bawah (subaltern). Kendati praktik prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial, aturan hukum, dan syariat agama, namun praktik haram ini tetap eksis dengan gejala, pola, dan modus yang terus berubah. Membiarkannya praktik prostitusi disebabkan oleh banyak faktor dalam kompleksitas kehidupan kota: sempitnya lapangan kerja formal, *gap* ekonomi yang ekstrem, disparitas modal sosial, pendidikan yang rendah (*low education*) atau ketiadaan keterampilan kerja (*unskilled worker*). Berbagai faktor itu ditengarai banyak pihak sebagai faktor penyebab (*causa prima*).

Dalam studi kasus di Indonesia dan Philipina, Jones, dkk (1995) menyebut dua faktor penyebab peningkatan praktik prostitusi: *supply* dan *demand*. Aspek *supply* terkait dengan *poorly educated* di masyarakat yang tinggi dan problem kemiskinan di kalangan perempuan. Ini dibuktikan dengan proporsi jumlah perempuan yang sangat besar di hampir semua jenis dan level prostitusi. Sementara aspek *demand* terkait dengan semakin membaiknya pendapatan (daya beli) laki-laki kota sebagai berkah dari pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, prostitusi tak serta merta bisa menghilang hanya melalui program perbaikan sosial ekonomi yang diinisiasi negara. Pasalnya, prostitusi terkait erat dengan ciri sosial unik masyarakat kota; selain terkait dengan gaya hidup warga kota, kesenjangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan eksploitasi gender. Kondisi inilah yang menghasilkan masyarakat kelas bawah atau kelompok rentan (subaltern).

Dari sisi klasifikasi, saat ini prostitusi terdiri dari ragam tipe, mulai dari tipe jalanan, tipe terselubung, tipe amatir, tipe panggilan, tipe lokalisasi (bordil), hingga tipe

pelacur kontemporer (yang memasarkan dirinya melalui media online). Saat ini, tipe pelacur terselubung, amatir, panggilan, dan tipe online kemungkinan jumlahnya lebih besar dibanding tipe pelacur jalanan dan pelacur lokalisasi. Dari sisi tampilan (*prostitute style*), peredaran dan amplifikasi PSK di masyarakat tampil dengan aksentuasi yang ‘samar’ dan kian sulit dikenali, karena pelacur kota saat ini umumnya tampil lebih santun dan *low profile*, dengan *fashion* yang jauh dari seronok. Fenomena ‘pelacur tersamar’ (*shadow prostitute*) ini telah eksis di banyak kota besar di Indonesia, bahkan dalam beberapa kasus, jenis ‘prostitusi santun’ ini telah masuk ke wilayah pedesaan.

Secara konseptual, istilah subaltern pertama kali digunakan oleh Antonio Gramsci untuk menunjuk ‘kelompok inferior’ dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni dari kelas berkuasa. Petani, buruh, pedagang kecil, pekerja serabutan, dan kelompok bawah lain yang tidak memiliki akses pada kelas hegemonik, elite berkuasa atau kelompok dominan bisa disebut sebagai kelas subaltern (*subaltern entity*). Dalam catatannya tentang sejarah Italia (*Notes on Italian History*, 1934), Gramsci mengeritik teks sejarah Italia yang tidak bercerita khusus tentang entitas subaltern. Padahal, kelas ini sesungguhnya memiliki kompleksitas sejarahnya sendiri; tak hanya sejarah kelas dominan yang selama ini diakui sebagai ‘sejarah yang resmi’ (*official history*). Kondisi ini terjadi karena entitas subaltern tidak memiliki akses pada penulisan sejarah, pada representasi kehidupan mereka, pada institusi sosial dan pranata budaya tempat mereka bertarung hidup. Singkatnya, jadilah subaltern sebagai kelas terkucil dari normalitas kehidupan masyarakat yang tidak memiliki cara untuk bersuara (Antariksa, 2009).

Dalam perspektif poskolonial dan *critical theory*, istilah subaltern mengacu pada penduduk yang secara sosial, politis, dan geografis berada di luar struktur kekuasaan hegemonik. Gagasan utama dari konsep poskolonialisme diilhami oleh pemikiran Frantz Fanon (dalam Willette, 2013) yang melihat kolonialisme Prancis di Aljazair sebagai kekuatan destruktif, yang mempraktikkan dehumanisasi, yang dilakukan melalui kekerasan fisik dan teror pada rakyat Aljazair. Rekonstruksi atas dominasi ideologi, budaya, dan tekanan psikis rezim kolonial Prancis ini bisa menjadi katarsis untuk mengembalikan derajat bangsa Aljazair dan bangsa-bangsa terjajah lainnya di wilayah Afrika dan Asia.

Pemikiran lain tentang poskolonialisme juga datang dari Edward Said (1978) yang melihat pelibatan kekuatan konstruksi wacana dalam kolonialisme, dan Homi K. Bhabha (2012) via kajian identitas, agensi sosial, dan hibriditas budaya sebagai alat perlawanan sosial. Sementara untuk kasus ketertindasan masyarakat India pascakolonial dari sisi ekonomi, politik, hukum, dan budaya terdapat studi Gayatri Spivak (1988), Gyan Prakash

(1994), Ratna Kapur (2001; 2014), Jane Krishnadas (2006) atau Narayan Sarkar dan Kaushik Kundu (2018) yang fokus kajiannya membedah aspek struktural dan kultural (termasuk dualitas ekonomi dan ketimpangan sosial) ditelisik dari teori subaltern.

Sebagai metode kajian, konsep subaltern awalnya bersifat kontroversial karena berciri kritis dan anti eurosentrisme dalam mengkaji marjinalisasi masyarakat non-Barat di Afrika dan Asia. Sejak dibentuk sebagai konstruksi teori untuk penelitian sejarah guna mengkaji dampak buruk sistem kolonial, kajian subaltern menjelma sebagai metode kritik historiografi poskolonial. Saat ini, teori subaltern digunakan di banyak bidang kajian, seperti studi sejarah, antropologi, sosiologi, geografi, kritik sastra, musikologi, sejarah seni, *cultural studies*, hingga ke kajian globalisasi, politik internasional, dan komunikasi.

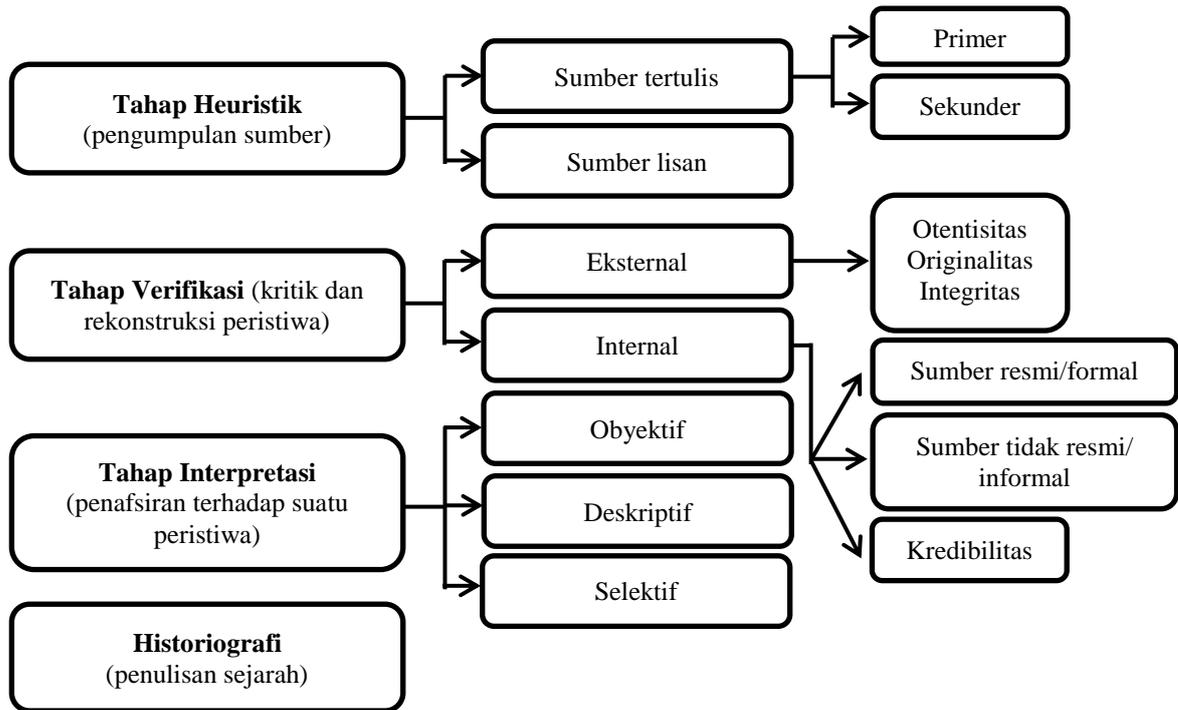
Berbasis elaborasi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dinamika prostitusi di Indonesia dari perspektif subalternitas. Pasalnya, dalam penulisan historiografi Indonesia modern, sebagian ahli menengarai masih ada ‘bias’ penulisan sejarah yang berciri ‘*people without history*’ sebagai sandingan dari konsep subaltern (Spivak, 1988). Kajian awal ini berupaya menganalisis praktik prostitusi sebagai fenomena masyarakat kota (*urban society*), dimana nilai-nilai feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme masih mewarnai *legacy* dan rekayasa pembangunan kota. Ciri ini diyakini memberi andil besar pada sebagian perempuan kota entitas subaltern untuk memilih profesi sebagai pelacur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berciri kualitatif dengan metode analisis deksriptif dan interpretif. Pendekatan kajian yang digunakan adalah pendekatan riset sejarah. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami dan menafsirkan aktivitas manusia di masa lalu, baik dalam kapasitasnya selaku aktor sosial maupun sebagai subyek sosial yang menghasilkan dunia sosialnya. Menurut Mason (2002: 25) “*penelitian kualitatif bersifat eksploratif, cair, dan fleksibel serta berbasis data dan peka terhadap konteks*” (*qualitative research is characteristically exploratory, fluid, and flexible, data-driven and context-sensitive*).

Adapun riset kualitatif dengan pendekatan sejarah, menurut Borg dan Gall (1989: 51) adalah “upaya deskripsi sistematis terkait dokumen dan sumber-sumber sejarah yang memuat informasi, data, fakta tentang peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau” (*systematic description efforts related to historical documents and sources that contain information, data, facts about historical events that occurred in the past*). Pendekatan riset sejarah tak hanya berciri positivis dan linier, namun juga kritis dan sirkuler. Tujuan utamanya untuk menghasilkan uraian sistematis, rekonstruktif, dan prediktif terkait fakta

dan peristiwa masa lalu (apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana) yang membahas posisi kelompok-kelompok sosial dalam periode sejarah tertentu secara kritis-dialektis.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Kualitatif Berbasis Pendekatan Sejarah

Sumber: Sucipto Ardi, 2019

Pendekatan sejarah adalah kumpulan metode yang digunakan sejarawan, arkeolog, dan antropolog untuk meneliti sejarah. Sumber sekunder, sumber primer, dan bukti-bukti material-fisik arkeologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi peristiwa sejarah secara lebih akurat (McCullagh, 1984). Dengan demikian, *historical approach* adalah telaah sistematis atas dokumen, literatur, dan sumber-sumber tertulis sejarah yang memuat informasi tentang peristiwa masa lampau. Pendekatan sejarah bertujuan menganalisis, merekonstruksi, dan menginterpretasi peristiwa masa lalu—yang merekam perjuangan berbagai kelompok sosial masa lalu yang berciri spesifik dan unik—secara deskriptif, sistematis, obyektif, selektif, dan kritis (Djamal, 2015: 103-104).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan: Dari Mitos Menuju Komodifikasi

Dalam ragam kisah sejarah manusia, posisi perempuan tak pernah lepas dari mitos, mulai dari simbol ‘subyek bernilai’ hingga simbol ‘komodifikasi’ (obyek kapital). Mitos (*myth*) adalah ‘subyek nilai’ yang merepresentasikan keyakinan (nilai-nilai dominan) tertentu dalam sebuah konstruksi budaya. Setiap peradaban memiliki konstruksi sejarah, narasi budaya, dan dinamika sistem sosialnya yang khas. Menurut Berger dan Luckmann

(1990: 29), realitas sosial adalah hasil interaksi dan pelebagaan nilai-nilai sosial kolektif yang digunakan sebagai basis konsensus sosial dari sebuah masyarakat. Pelebagaan atas norma, nilai, dan sistem sosial yang bertransformasi ke dalam konsensus sosial ini tentu akan mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku pada setiap individu yang ada dalam budaya masyarakat bersangkutan. Sebagai sistem nilai yang berakar dalam budaya masyarakat, mitos memiliki akar sejarah panjang dalam peradaban manusia.

Dalam etape perjalanan peradabannya, manusia selalu bersentuhan dengan mitos yang memberi pengaruh pada perilaku masyarakat secara kolektif. Secara umum, mitos atau mitologi dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan dan kepercayaan yang menjadi tatanan norma dan sistem nilai dalam sebuah masyarakat. Meski derajat validitas dan faktualitasnya secara empiris sulit dibuktikan secara ilmiah, namun secara spirit-transendental mitos adalah sebuah sistem nilai sosial (dan konstruksi budaya) yang sangat diyakini masyarakat pada masanya (Mustaqim, 2018).

Sejarah mitos tak hanya milik masyarakat Indonesia, di Yunani (dan Eropa) yang menjadi epi sentrum filsafat rasionalisme, juga tak lepas dari jerat mitologi. Bahkan di era modern saat ini, mitos masih berlaku dan diakui di banyak peradaban dunia. Di Yunani, mitologi perempuan dicitrakan sebagai dewi yang punya banyak fungsi, seperti *Hera* (dewi pernikahan), *Eos* (dewi fajar), *Hestia* (dewi api suci), *Demeter* (dewi kesuburan), *Aphrodite* (dewi cinta), *Athena* (dewi kebijaksanaan) adalah sederet nama dewi Yunani. Ada juga dewi yang dimitoskan sebagai simbol ‘dualitas sifat manusia’, yakni *Dewi Pandora*, yang hingga kini melekat dalam mitos ‘kotak Pandora’ (Mustaqim, 2018).



Gambar 2. Dewi Yunani Kuno, Dewi Isis dan Thutankamun (Mesir), dan Dewi Kwan In (Cina)
 Sumber: Diambil dari berbagai sumber

Gambaran tentang mitologi dewa-dewi ini tentu memberi pengaruh signifikan pada sistem nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat saat itu. Terminologi ‘dewi’ kemudian banyak dipakai untuk menyebut peran penting perempuan dalam mitologi (asal-usul sejarah mitos). Di Cina (tradisi konfusian/Budhisme) ada mitos *Dewi Kwan Im*

yang menjadi simbol kebijaksanaan dan pertolongan. Dalam mitologi mesir dikenal pula *Dewi Isis*, yang dipercaya sebagai dewi keibuan dan kesuburan. Dalam tradisi Hindu di India, ada nama *Dewi Gangga*, sosok dewi yang dimitoskan sebagai dewi kesuburan dan pembersihan dosa. Sungai Gangga di India, hingga kini masih diyakini masyarakat Hindu India sebagai sumber kesuburan dan kesucian umat Hindu negeri para dewa itu.

Pun dalam budaya Jawa, ada juga mitos *Dewi Sri* yang dipercaya sebagai dewi kesuburan atau mitos *Ninik Thowok (Ninik Thowong)* epik *urban legend* masyarakat Jawa tentang sosok putri Cina berwajah putih, berbentuk *jelangkung*, namun diyakini bisa diminta memberi kesejahteraan (Ulivia, 2018). Terminologi ‘dewi kesuburan’ ternyata bukan cuma mitologi milik budaya/tradisi Jawa (baik Jawa Kuno maupun Jawa kontemporer). Di beberapa wilayah budaya lain di Indonesia, mitos dewi kesuburan semisal *Dewi Sri* ini juga dikenal luas, namun memiliki istilah dan penyebutan yang berbeda, seperti *Dewi Seblang* (di Banyuwangi), *Dewi Sangiang Sri* (di tanah Bugis), *Dewi Sri Dangdayang Tisnawati* (di tatar Sunda), *Dewi Indung Bunga* (di bumi Melayu), *Dewi Bini Kabungsuan* dan *Dewi Mahatala-Jata* (di suku Dayak) atau *Dewi Betari Sri* (di tanah Bali) adalah sederet nama-nama dewi yang kurang lebih punya makna mitologi yang sama. Mitologi dewi sangat penting bagi masyarakat dengan tradisi agraris seperti di Indonesia. Manifestasinya ada dalam sistem kepercayaan dan ritual tradisi suku tertentu.

Dalam ragam budaya dan tradisi di atas, posisi perempuan—dalam mitologi dunia—cenderung ditempatkan sebagai ‘simbol penting’ dalam sistem nilai kepercayaan masyarakat. Karena mitos adalah sebuah citra *imajiner* yang mampu mempengaruhi dan memotivasi bawah sadar manusia sebagai makhluk budaya. Namun, dengan hadirnya kolonialisme dan kapitalisme di banyak negara Asia dan Afrika (juga di Timur Tengah dan Amerika Latin) praktis telah merubah posisi (mitologis) perempuan dari ‘subyek penting budaya’ menjadi sekedar ‘obyek komodifikasi’. Pergeseran cara pandang ini menjadi bukti kuatnya pengaruh kapitalisme-kolonial yang sukses mendorong hasrat konsumtifisme, menciptakan ragam kebutuhan baru, dan memberi porsi luas bagi logika akumulasi kapital. Nilai-nilai materialistik dari ideologi kapitalisme-kolonial ini praktis memandang semua benda (termasuk tubuh perempuan) memiliki ‘nilai ekonomis’.

Implementasi lanjut cara pikir kapitalisme-kolonial saat ini tercermin dari gagasan *idea of progress* melalui proyek globalisasi. Globalisasi (termasuk globalisasi gaya hidup) terus berupaya merubah tata nilai budaya mitis-tradisional menuju tata nilai rasional-material untuk mengubah kesadaran kolektif manusia menuju satu kesadaran baru bernama ‘akumulasi kapital’. Kemolekan tubuh dan daya pesona perempuan diolah oleh

kapitalisme global menjadi ‘produk unggulan’ yang harus diintegrasikan ke dalam sirkuit kapitalisme. Tak ayal, posisi perempuan pun menjadi subordinasi para pemilik sirkulasi kapital; dan tubuh perempuan menjadi komoditas baru penghasil kapital.

Feodalisme: Era Subalternitas Perempuan

Wajah prostitusi adalah kelanjutan komersialisasi seks di masa kolonial (bahkan di era feodal) yang memberi dasar bagi eksistensi industri prostitusi saat ini. Menurut Lim (1998), kondisi itu bisa dilihat secara kritis dari cara pandang (nilai-nilai dominan) yang berkembang di masa rezim feodalisme (yang berlanjut ke masa rezim kolonialisme), dimana perempuan dilihat sebagai barang berharga. Aktivistis feminis Eropa, Silvia Federici, dalam *Caliban and The Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation* (2014) mencatat, tradisi feodalisme Eropa telah sukses melakukan proses akumulasi primitif dan kontrol penuh negara atas tubuh perempuan sebagai faktor penting dalam sistem kapitalisme yang berdiri kokoh hingga saat ini. Dari sudut pandang feminis, perkembangan kapitalisme tak bisa dilepaskan dari ‘sejarah marginalisasi perempuan’ sebagai produk pemisahan kelas (pekerja laki-laki) dan kelahiran kelas pekerja baru: pekerja perempuan (*women worker*) (Federici, 2014: 12; Izzati, 2020).

Kultur patriarki era feodal menjadi pemicu awal terbentuknya stigma perempuan sebagai obyek komodifikasi dan obyek komersialisasi. Komodifikasi tubuh perempuan mengacu pada simbol kecantikan dan kemolekan. Tubuh perempuan—meminjam konsep modal simbolik Pierre Bourdieu—menjadi semacam ‘modal kapital’ (aset fisik) yang memiliki ‘nilai tukar’ (*exchange rate*); atau meminjam konsepsi modal simbolik Bourdieu menjelma sebagai komoditas yang bisa ‘diperjualbelikan’ (Yulianto, 2020: 117). Di era kapitalisme, cara pandang atas nilai tukar dan profit ini mau tak mau memosisikan perempuan sebagai simbol komersialisasi dan obyek komodifikasi. Atau dalam konsep ‘relasi kuasa’ versi Michel Foucault (1990: 95), kapitalisme telah sukses mengubah relasi kuasa perempuan dari tradisi feodalisme yang berciri tradisional-domestik-matriarkat ke tradisi kapitalisme yang berciri rasional, bersifat publik, berwatak patriarkat.

Di Eropa, perampasan otonomi atas tubuh perempuan era feodalisme setidaknya terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, adanya sistem pembagian kerja secara seksual (*sexual reproduction*) yang berhasil mentransformasi kerja domestik dan fungsi reproduksi perempuan yang berciri privat ke dalam ranah publik (*labour reproduction*). Kedua, berlangsungnya pembentukan tatanan patriarkat yang memosisikan perempuan sebagai pekerja upahan. Tatanan ini praktis telah berhasil mentransformasi perempuan sebagai

komodi baru. Ketiga, kontrol legal atas pesona dan kemolekan tubuh perempuan ke dalam mekanisme produksi baru (yang bisa dijual dan dipasarkan). Ketiga argumen itu membuat pembagian kerja perempuan yang awalnya bersifat reproduktif, atau terbatas pada jenis kerja upahan di rumah (*paid work at home*), diubah secara ekonomis menjadi kerja formal (yang bersifat publik) guna mendukung proses akumulasi kapital (Federici, 2014: 12).

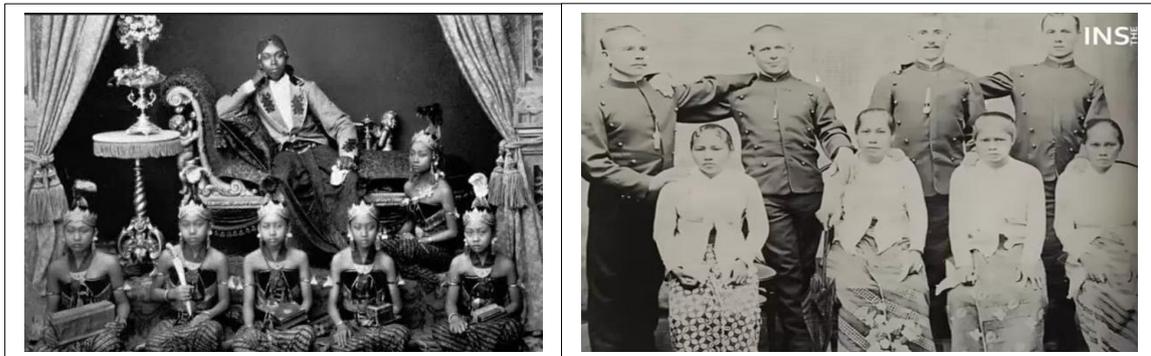
Di era feodal, prostitusi adalah bentuk kekerasan seksual paling brutal yang berakar dari pembagian kelas dalam masyarakat berdasarkan prinsip kasta. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap perempuan selalu berubah seiring perubahan susunan masyarakat kelas. Sejak masyarakat feodalisme terbelah, dan kapitalisme membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, posisi perempuan berubah dari ‘sosok agung yang dihormati’ (Jawa: *padmini*, *citrini*, dan *sankini*) menjadi sekedar alat produksi (obyek eksploitasi). Marjinalisasi perempuan sebagai entitas subaltern, secara historik juga terkait dengan sistem hak milik pribadi (*property right*). Pada masyarakat agraris awal—jauh sebelum manusia mengenal konsep pertukaran komersial (*trade off*)—perempuan sudah mulai ditukar dengan ternak sebagai hadiah perkawinan. Era feodalisme juga mengukuhkan fenomena kelas selir, selain istri sah, bagi pria bangsawan (Kabalen, 2019).

Ditelisik lebih dalam, Poesponegoro & Notosusanto (2019: 119) mencatat laporan paling awal tentang pelacuran dalam kehidupan awal feodalisme Jawa. Catatan sejarah kuno yang berasal dari sumber Tiongkok—Dinasti Tang Ch’iu-T’ang Shu dan Hsin T’ang Shu (± tahun 640 masehi)—menyebut bahwa di negara Ho-ling (di Jawa) ada sejumlah ‘wanita beracun’ alias perempuan *lacur*. Para lelaki yang berhubungan seks dengan pelacur ini akan luka bernalah dan mati setelahnya. Catatan Ben Anderson (1991) juga menyebut praktik prostitusi di Jawa dalam catatan *Serat Centhini*. Bagi Anderson, kehebatan *Serat Centhini* adalah keberanian dalam mengungkap sejarah prostitusi secara terbuka terkait perilaku seks di kalangan kelas priyayi dan bangsawan Jawa yang cukup melegenda (Ardhana, 2017).

Terence Hull dalam *From Concubines to Prostitutes, A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia* (2017: 65) juga menjelaskan asal-usul prostitusi di Indonesia yang jejaknya bisa ditelusuri hingga ke masa feodalisme, dimana komoditisasi perempuan menjadi bagian integral dari sistem feodal, terutama saat kerajaan Jawa Mataram (Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta)—sebagai kerajaan Jawa-Islam yang terletak di pedalaman selatan Jawa Tengah—pernah dipecah dua oleh Belanda melalui perjanjian Giyanti tahun 1755. Pada periode ini, konsep kekuasaan raja Jawa digambarkan sebagai kekuasaan yang bersifat *agung-binatara* (agung dan berkuasa).

Kekuasaan raja-raja Mataram yang *agung-binatara* dan *adi-luhung* ini digambarkan sebagai pemilik segalanya; tidak hanya tanah dan harta benda, namun juga seluruh sendi kehidupan rakyatnya, termasuk penguasaan raja atas perempuan.

Kebesaran dan tingkat kekuasaan raja-raja di Jawa direpresentasi oleh seberapa banyak selir/gundik yang ia miliki. Di samping upeti, bangsawan yang memberikan putrinya sebagai selir kepada raja menunjukkan tanda kesetiaan mereka. Di era ini, banyak perempuan yang berasal dari kelas bawah (subaltern) dijual atau diberikan oleh keluarga mereka kepada para bangsawan untuk meraih posisi kelas (kasta) lebih tinggi dalam struktur masyarakat feodal. Jika selir yang berasal kalangan keluarga bangsawan mendapat fasilitas hidup mewah dari istana, maka perempuan ‘milik raja’ yang berasal dari masyarakat kelas subaltern hanya digunakan jika dianggap perlu sebagai pemuas nafsu belaka. Di Bali, janda yang berasal dari kasta rendah dalam tradisi Hindu otomatis menjadi milik raja. Jika keluarga sang janda tidak menyerahkannya sebagai gundik/selir, maka sang janda harus bekerja sebagai pelacur; dan bagian dari pendapatannya sebagai pelacur harus diserahkan (atau di-*share*) kepada pihak istana (Hull, 2017: 66).



Gambar 3. Selir, Nyai atau Gundik di Masa Kolonial Belanda

Sumber: hops.id, 2023

Dalam mitologi Jawa, yang berkembang sejak dulu, juga dikenal konsep poligami, seperti *Lelaning Jagad* (kesaktian sosok laki-laki lewat simbol Arjuna yang memiliki beberapa istri), *Katurangga* (simbol wanita pemuas seks kaum pria), *Aji Semarmesem* atau *Aji Asmaragamu* (simbol kamasutra Jawa, dicirikan oleh sanggul/*gelung kondhe*, visualisasi yang merepresentasikan alat kelamin pria dan wanita) atau *Jalu Usada* (simbol kejantanan pria). Ada juga konsep lain yang terkait dengan mitos seksualitas Jawa, seperti istilah *ngladeni* (konsep kebebasan pria menjadikan wanita sebagai sarana pemuas hasrat seksual) atau konsep *wanit kuwi kanca wingking*, yang bermakna domestifikasi peran perempuan, yakni mengurus dapur, sumur, kasur, dan susur (kumparan.com, 2017). Hedonisme seks dalam sistem feodalisme Jawa menunjukkan bahwa sistem kekuasaan

(*kasekten*) yang di dominasi kisah ‘kesaktian dan kejantanan pria’ potensial direkayasa dalam kultur patriarki. Hedonisme seksualitas, secara tersirat merupakan konkretisasi dari konstruksi kekuasaan feodal, seperti terekam dalam naskah penting *Serat Pararaton* yang mengisahkan tentang kegilaan Ken Arok atas kecantikan dan kemolekan tubuh Ken Dedes, isteri penguasa Tumapel, Tunggal Ametung (kumparan.com, 2020).

Dalam praktiknya, konsep kekuasaan Jawa yang dicirikan oleh dimensi magis-spiritual (seperti *kasekten* atau kesaktian), dalam banyak kasus kerap dikaitkan dengan teks kejantanan, kesaktian, kemolekan, dan seksualitas. Dengan mengambil contoh dari ‘kisah perempuan gaib’ Nyi Roro Kidul (penguasa mitis pantai selatan) atau Ken Dedes (sosok yang dimitoskan dalam sejarah Hindu), genealogi mitos tersebut membuktikan bagaimana sosok perempuan dalam kultur feodalisme Jawa dipandang sebagai simbol magis-spiritual sekaligus simbol seksual; *vis a vis* simbolitas laki-laki sebagai sosok sakti *mandraguna* dan jantan (Smith & Woodward, 2016: 316).

Menurut Adi Deswijaya (dalam Setiawan, 2020), pada masa sastra Jawa Baru abad 18 hingga 19, tak sedikit pujangga Jawa menulis serat yang cenderung bermuatan seks atau berisi catatan persenggamaan, bahkan kisah tentang penyimpangan seks. Teks *Babad Tanah Jawi* (versi Carik Adilangu II, yang ditulis tahun 1722; yang memuat banyak kisah *asmaradahana* atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan Jawa), teks *Serat Centhini* (1814-1823; teks ini berisi *saresmi*, yang memuat tatacara, anjuran, perintah, dan larangan bersenggama), teks *Narasawan* (1930; teks ini mengisahkan tentang persetubuhan manusia dan makhluk halus), teks *Kawruh Sanggama* (1932; teks ini berisi penjelasan tentang bagaimana kiat mendapat keturunan yang baik, memuaskan wanita, teknik bersenggama, hingga larangan dalam ritual senggama).

Dalam Novel *Gadis Pantai* (1999) karya Pramoedya Ananta Toer, konstruksi nilai-nilai feodal yang tertanam kuat pada sebagian besar perilaku kelas priyayi didasari relasi sinerjis antara budaya Jawa dengan sistem kolonial. Cara memimpin, cara memerintah atau cara mengelola pemerintahan keraton sangat mirip dengan sistem feodalisme Eropa. Semua sisi kehidupan publik diatur secara ketat tanpa kompromi. Di bawah pengaruh sistem feodalisme kolonial, para priyayi membebani perempuan dengan berbagai jenis aturan diskriminatif, seperti terekam dalam kisah Bendoro (sosok priyayi Jawa) dengan mas Nganten (sosok gadis pantai).

Sebagai sosok priyayi (bangsawan) Jawa, Bendoro bekerja pada Belanda. Statusnya sebagai kelas priyayi telah memberinya legitimasi (kekuasaan dan kewenangan penuh) untuk memanfaatkan rakyat kecil, baik sebagai pelayan maupun gundik. Sementara mas

Nganten, yang awalnya hidup sederhana karena statusnya sebagai rakyat biasa, anak seorang nelayan miskin, pola hidupnya berubah drastis setelah ia dipinang dan dijadikan gundik oleh Bendoro. Sistem feodal yang ‘kastaistik’ ini digunakan oleh para bangsawan Jawa sebagai alat kendali kekuasaan, termasuk kendali atas hak perempuan, yang saat itu mayoritas berada pada posisi kelas subaltern (Rahmawati, 2011: 81).

Transisi dari feodalisme ke kapitalisme bukanlah suatu proses linier, melainkan ditandai oleh dimensi-dimensi sirkuler, seperti gender dan ras, terutama kontrol atas tubuh perempuan yang signifikan dalam menentukan cara produksi kapitalisme abad pertengahan. Melalui perspektif feminisme dan teori poskolonial, Spivak (1988), Ratna Kapur (2001), dan Krishnadas (2006) sampai pada simpulan bahwa pertumbuhan industri prostitusi di India tak bisa dilepaskan dari posisi perempuan sebagai subyek seksual pasca yang tumbuh di era feodalisme dan menguat di era kolonialisme Inggris. Wacana subaltern di India berelasi dengan dalil hukum sebagai alat yang kian mengukuhkan ketimpangan hubungan gender dan relasi seksualitas, dominasi kasta dan eksklusifitas hak kepemilikan properti serta hegemoni agama. Menurut Kapur, watak Hindu Kanan (di masa feodalisme India) maupun watak kapitalisme Barat (di masa kolonialisme Inggris) yang membawa prinsip-prinsip kastaisme dan hukum liberal telah memberi andil besar dalam menciptakan perempuan sebagai entitas subaltern di berbagai wilayah kota metropolitan di India, termasuk di wilayah Asia lainnya.

Di Mesir dan di negara-negara jazirah Arab, tekanan sosial (eksploitasi dan penindasan) yang dialami perempuan disana, menurut El-Saadawi (2011), bukan ciri khusus masyarakat Arab atau negara Dunia Ketiga saja. Di Eropa masa feodalisme, perempuan adalah bagian integral dari obyek politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berpengaruh besar di hampir seluruh dunia, baik sistem itu melingkupi masyarakat terbelakang yang masih bersifat tradisional-feodal maupun masyarakat industri modern yang berada di bawah pengaruh kekuasaan sains dan teknologi. Realitas kehidupan perempuan dalam masyarakat industri modern faktual lahir dari perjalanan panjang sistem feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme yang pada akhirnya mengukuhkan penguasaan satu kelas atas kelas lain, terutama penguasaan laki-laki atas perempuan.

Dalam novel *Perempuan dari Titik Nol* (2002), El-Saadawi juga mengisahkan sisi gelap yang dihadapi entitas perempuan Mesir di tengah kebudayaan Arab yang kental dengan nilai-nilai patriarki. Seperti bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain pada umumnya yang menganut budaya patriarki, posisi dan kedudukan perempuan Mesir dalam konstruksi budaya patriarki hingga kini masih menuai polemik. Di hampir seluruh

dimensi kehidupan (politik, sosial, ekonomi, dan budaya) hak-hak perempuan Mesir masih berada di posisi marjinal, seperti hak atas kebebasan politik, penjara hirarki budaya patriarkat, diskriminasi ekonomi, kekerasan, dan kemiskinan. Nasib perempuan subaltern di Mesir, menurut El-Saadawi, hingga kini masih menjadi potret nyata, dimana realitas yang sama juga masih eksis di berbagai wilayah dunia lainnya. Posisi perempuan era feodalisme adalah produk dari sistem kelas, reproduksi seksual, marginalisasi budaya, inferioritas sosial, dan diskriminasi ekonomi.

Di era feodalisme konstruksi sublaternitas perempuan nampak jelas dari skenario politik tubuh perempuan sebagai obyek seksual. Di masa feodal, politik tubuh perempuan berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, mendominasi, dan pada saat yang sama, mengomodifikasi dan mengomersialisasi tubuh perempuan. Beragam mitos tentang perempuan di era feodal adalah wujud kultur patriarki dan upaya laki-laki untuk memahami nilai intrisik dan unik yang bersemayam dalam misteri tubuh perempuan.

Kolonialisme: Era Komodifikasi dan Komersialisasi

Bentuk dan tatakelola industri seks yang lebih terorganisir melaju kian dinamis sepanjang masa kolonial Belanda. Sistem perbudakan dan pergundikan tradisional yang eksis di masa feodal mengalami adaptasi dengan kebutuhan dan kebiasaan hidup masyarakat Eropa dan sistem kapitalisme kolonial yang tumbuh pesat di wilayah pesisir pelabuhan Nusantara. Praktik warisan feodalisme dan masuknya sistem kapitalisme kolonial inilah yang disinyalir Ingleson (1986) sebagai fondasi yang memperkokoh pertumbuhan industri prostitusi di Indonesia hingga kini. Seiring kemajuan kepemilikan pribadi sebagai fondasi sistem kapitalisme, pertukaran komersial berkembang, dan kapitalisme mengubah posisi perempuan *kampoeng* sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar perkotaan. Kampung, terutama kampung kumuh (*slum*) di pinggiran kota kerap dilihat sebagai komunitas terisolir, marjinal, dan eksklusif.



Gambar 4. Prostitusi di Era Kolonialisme Belanda

Sumber: jogja.tribunnews.com (foto kiri); idonesia.com (foto kanan)

Stereotipe ini muncul akibat kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang berciri ‘dualistik’ dan ‘bias kota’, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bukan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, namun syarat ketimpangan di antara kelas-kelas ekonomi masyarakat kota. Komunitas kampung, yang pembentukannya memiliki sejarah panjang dan selalu beririsan dengan kehadiran kota, hampir tidak dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan sejarah kota (Akhyat, 2006). Prostitusi, akhirnya menjadi bisnis menggiurkan, menjadi mata pencarian, sekaligus ‘mesin uang’ dalam mekanisme transaksi ekonomi perempuan perkotaan, terutama perempuan kelas bawah (subaltern).

Senada dengan Ingleson, hasil riset Terence Hull (1997) juga menyebut fenomena industri seks di Indonesia kian eksis di era kolonial Belanda, bahkan berlanjut hingga ke masa kolonialisme Jepang (1941-1945). Cikal bakal komersialisasi seks di Indonesia dimulai pada tahun 1852, saat pemerintah Belanda di Indonesia melegalisasi prostitusi. Saat itu, wanita-wanita yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) mendapat julukan sebagai ‘*public women*’ atau ‘*publieke vrouwen*’ (wanita publik). Kota Batavia misalnya, dulu sudah menjadi surga per-‘gundik’-an atau per-‘*nyai*’-an. Para sejarawan Barat menyebut Batavia hanyalah bagian kecil dari atmosfer dunia pergundikan yang sudah begitu mapan dan merata di hampir tiap sudut kota Batavia (Ingleson, 1986; Baay, 2017). Orang Betawi kala itu menyebut perempuan *lacur* sebagai ‘*cabo*’ (adaptasi dari bahasa Cina *Caibo*, yang berarti perempuan). Lokalisasi untuk para *cabo* di Batavia bisa ditemukan disekitar hotel dan kawasan niaga. Sementara lokalisasi prostitusi untuk kalangan rendahan biasa ditemukan di kawasan Glodok dan Mangga Besar.

Di awal tahun 1800-an, saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, saat ia pertama kali menginjakkan kakinya di Batavia, ia melihat kenyataan buruk, dimana pergundikan dan pelacuran berlangsung sangat semarak. Sang Gubernur Jenderal melihat langsung betapa para pejabat kolonial Belanda sudah mapan dengan gaya hidup hedonis, berfoya-foya, dan memelihara perempuan pribumi sebagai gundik atau *nyai* mereka. Menurut Baay (2017), warga negara Belanda keturunan *nyai* mengatakan, mulai abad ke-18 Batavia pada saat itu memang sudah layak disebut sebagai kota gundik dan kota budak.

Gemser Brinkman misalnya, adalah contoh laki-laki *hidung belang* terhormat, namun ia tega membunuh pasangan kencannya, Fientje, yang menjadi teman tidur tetap Brinkman dengan cara dicekik. Hukum kolonial Belanda yang keras terhadap perilaku amoral tak memberi ampun. Brinkman dijatuhi vonis hukuman mati. Sebagai orang kulit putih, perbuatan keji Brinkman tentu membuat orang Belanda dan pejabat Hindia Belanda

moralis terkejut atas perilaku sadisnya. Ternyata dari ras Eropa ada juga sosok pria *hidung belang* yang tega menjadi pembunuh seorang pelacur (Matanasi, 2019).

Brinkman bukan satu-satunya orang Belanda yang punya kasus seksual yang unik. Dalam buku karya Rosihan Anwar, *Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950* (1985: 51-52), dan buku J. C. Bijkerk, *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik* (1988: 17-21) juga mencatat, di tahun 1938, ada pejabat tinggi kolonial yang kedapatan mencabuli bocah pribumi laki-laki di sebuah hotel. Pejabat ini akhirnya di tahan di penjara Sukamiskin Bandung selama satu setengah tahun (Matanasi, 2019).

Dinamika prostitusi di masa kolonial juga terkait dengan militer. Pelacuran menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemuda pribumi yang ingin bergabung dengan militer Belanda (KNIL). Setidaknya, bayaran sebagai tentara KNIL memungkinkan mereka ikut mencicipi nikmatnya dunia pelacuran. Jika dikalangan perwira KNIL Belanda, umumnya lebih memilih memelihara gundik atau *nyai*, maka di level serdadu bawahan (prajurit atau bintara) mereka lebih memilih menjadi pelanggan tetap pelacur. Di KNIL, perempuan cukup direndahkan martabatnya. Mengatasi masalah seksual pun diajarkan di sana. Kebiasaan bercinta pada serdadu KNIL tersebut ikut melahirkan tempat-tempat pelacuran di era kolonial, terutama di wilayah pesisir dan perlintasan rel kereta. Tempat pelacuran (rumah bordil) biasanya letaknya tidak jauh dari tangsi tentara, bisa disamping atau di belakang tangsi. Perilaku maksiat serdadu KNIL tak hanya terjadi di luar tangsi, di dalam tangsi pun kemaksiatan sudah menjadi hal biasa (Susanto & Supriatma, 1995: 17).



Gambar 5. Prostitusi di Era Kolonialisme Jepang

Sumber: kompas.com, 2022 (foto kiri); tirta.id, 2017 (foto kanan)

Frances Gouda dalam *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942* (2007: 198), menyebut telah terbentuk opini luas di masyarakat Eropa tentang perilaku militer KNIL yang penuh skandal di barak-barak militer Hindia Belanda sebagai tempat transaksi seksual yang penuh maksiat. Menurut Gouda, di mata para serdadu Belanda, perempuan pelacur pribumi hidup dengan moralitas rendah dan tanpa martabat.

Seperti ditulis Gouda (2007: 201): “*Bayangkan, ratusan serdadu tidur bersama gadis atau pembantu perempuan mereka di barak, pemandangan ini tak ubahnya seperti perkawinan massal binatang*”.

Meskipun telah diatur secara ketat, prostitusi liar tetap menjamur, terutama seiring munculnya proyek pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor perkebunan, jalan raya, rel kereta, dan irigasi yang banyak melibatkan tenaga kerja pria, baik itu di Jawa maupun Sumatra. Pada saat pembangunan rel kereta api di Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya pada 1884, muncul tempat-tempat lokalisasi prostitusi besar dan terkenal (bahkan bertahan hingga saat ini). Pertumbuhan tempat prostitusi baru ini dipicu oleh kedatangan pengunjung dari kota-kota besar di Indonesia (dan arus urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa) seiring terhubungnya kota-kota besar di Jawa oleh rel kereta api. Beberapa tempat prostitusi atau lokalisasi (resmi maupun liar) yang muncul di era itu ada di lokasi-lokasi yang dekat dengan stasiun kereta api, seperti di Kebon Jeruk, Tanah Abang, Jatinegara, Tanjung Priok (Jakarta); di Kebon Tangkil, Sukamanah, dan di Saritem (Bandung); di Pasar Kembang (Yogyakarta), atau lokalisasi di sekitar wilayah Stasiun Semut (Surabaya) (kumparan.com, 2019).

Lepas dari penjajahan Belanda, Indonesia beralih dikuasai Jepang (1942-1945). Di masa penjajahan Jepang inilah kembali dimulai perbudakan seks yang dilakukan tentara Jepang terhadap wanita-wanita Indonesia. Para perempuan yang sebelumnya sudah berprofesi sebagai PSK dikumpulkan, di cek kesehatannya, kemudian disebar ke berbagai rumah bordil untuk dijadikan budak seks tentara Jepang. Tak hanya perempuan pribumi Indonesia, wanita dari Belanda, Singapura, Malaysia, dan Hongkong dipaksa datang ke Jawa untuk menjadi *comfort women* atau *Jugun Ianfu* (kumparan.com, 2019).

Mengutip laporan sejarawan Cina, Hua Lun Huang (*The Missing Girls and Women of China, Hong Kong and Taiwan*, 2012), sebagian besar perempuan korban perbudakan seksual tentara Jepang berasal dari Korea, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, Indonesia, Timor Leste, dan wilayah lainnya. Kantor berita *Reuters* (Inggris) mengonfirmasi, ada perempuan Perancis yang juga dipaksa menjadi pelacur di rumah bordil militer Jepang. Kantor berita *Chosun* (Korea Selatan) dan *The Age* (Australia) juga melaporkan, banyak perempuan Belanda dan Australia yang dipaksa menjadi penghuni rumah bordil saat Indonesia ada di bawah pendudukan tentara Jepang (Firman, 2017).

Laporan media Inggris, *British Broadcasting Corporation* (BBC) menyebut, Jepang menjalankan praktik perbudakan seksual di bawah kontrol ketat militer di masa penjajahan. Banyak perempuan dari Jawa dibawa ke garis depan peperangan, seperti di

Kalimantan, Sulawesi, juga Maluku dan Pulau Buru. Mereka kemudian ditempatkan di *Ianjo* (rumah bordil) yang tersebar di berbagai daerah. Banyak pula diantara mereka yang mengalami perkosaan tentara Jepang selain di *Ianjo*. Menurut Yoshiaki Yoshimi dalam *Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II* (2000), jumlah wanita yang menjadi korban perbudakan militer Jepang diperkirakan sekitar 150.000 hingga 200.000 orang, yang tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sementara laporan Hua Lun Huang (2012) menyebut jumlah jumlah korban perbudakan seks tentara Jepang diperkirakan sekitar 360 ribu hingga 410 ribu orang (Firman, 2017).

Namun, seperti dikisahkan Bung Karno dalam autobiografinya (*Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*, 2020), ada sisi romantise dalam perjuangan kemerdekaan terkait peran PSK; yang oleh Bung Karno disebut pasukan ‘kupu-kupu malam’. Di masa revolusi, pasukan kupu-kupu malam ini memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut pengakuan Bung Karno, selaku tokoh pergerakan ia membutuhkan ruang privasi untuk menyusun strategi perjuangan bagi para aktivis politik pergerakan dan barisan pejuang kemerdekaan. Sebab, hampir tak ada tempat yang ‘steril’ bagi kaum pergerakan, karena Polisi Rahasia Belanda (Politieke Inlichtingen Dienst/PID) selalu mengintai mereka. Mengutip Takashi Shiraishi dalam *Hantu Digoel* (2001), kantor dan agen-agen PID sudah tersebar diberbagai tempat (Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lain). Hampir seluruh tokoh pergerakan menjadi target PID, termasuk Bung Karno yang saat itu bermukim di Kota Bandung (Matanasi, 2017).

Bung Karno mengakui, dirinya dan para aktivis pergerakan sering mengadakan rapat di kompleks pelacuran (rumah bordil) antara pukul 08.00 atau pukul 09.00 malam. Dalam autobiografinya Bung Karno tegas menyebut para ‘pelacur nasionalis’ adalah mata-mata terbaik di dunia. Di masa pergerakan nasional, peran ‘pelacur nasionalis’ lebih hebat dibanding intel Belanda. Kepada kolega-koleganya di Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno kerap berujar: “*kalau kalian menghendaki mata-mata yang jempolan, berilah aku seorang pelacur yang berjiwa nasionalis*”. Daya tarik seksual pelacur, saat ini pun masih diakui sebagai salah satu aktor penting dalam dunia intelijen.

Wajah Prostitusi Pasca Kemerdekaan

Memasuki era kemerdekaan, nasib perempuan *lacur* (terutama yang berasal dari entitas subaltern) tetap tak berubah. Laporan International Labour Organization (ILO) menyebut, di negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan

Thailand jumlah pasti pelacur di negara-negara Asia Tenggara tersebut tidak dapat dihitung karena sifat pekerjaan mereka yang ilegal, rahasia, terselubung. Namun, antara 0,25 persen dan 1,5 persen dari total populasi perempuan di keempat negara terlibat dalam bisnis dan praktik prostitusi. Prediksi pekerja seksual versi ILO (yang disusun pada tahun 1993/1994) memperkirakan masih ada 140.000 hingga 230.000 orang pelacur di Indonesia (ilo.org, 1998).

Sementara di negeri jiran seperti Malaysia, perkiraan jumlah pelacur berkisar antara 43.000 hingga 142.000. Di Filipina, jumlah angka pelacur berkisar antara 100.000 hingga 600.000, namun kemungkinan besar terdapat hampir setengah juta pelacur di negeri lumbung padi tersebut. Di Thailand, survei Kementerian Kesehatan Masyarakat mencatat terdapat 65.000 pelacur pada tahun 1997 namun sumber tidak resmi menyebutkan angkanya antara 200.000 hingga 300.000. Ada juga puluhan ribu pelacur asal Thailand dan Filipina yang menjadi diaspora di negara lain. Pelacur tersebut sebagian besar adalah perempuan, namun ada juga pelacur laki-laki, waria, dan anak-anak (Lim, 1999).

Prostitusi merupakan jenis pekerjaan berketerampilan rendah, padat karya, bersifat perempuan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik dibanding jenis pekerjaan 'informal perempuan' lainnya. Prostitusi adalah bisnis bernilai miliaran dolar, memiliki jejaring luas dan fleksibel, dan memberi pekerjaan ekstra pada jutaan perempuan di seluruh dunia. Prostitusi umumnya terjadi di wilayah kota atau pinggiran kota di negara berkembang, namun tak jarang bisnis ini juga terjadi di negara-negara maju. Laporan National Health and Social Life Survey (NHSL) tahun 1992 menyebut, ada sekitar 2 persen perempuan Amerika yang diperkirakan pernah berprofesi sebagai penjaja seks, sementara di Jerman jumlah pelacur mencapai 150.000 orang, dan di Kota Amsterdam (Belanda) diperkirakan ada sekitar 25.000 pelacur (Edlund & Korn, 2002: 182).

Data sejarah memberi catatan, bahwa praktik prostitusi di Indonesia didorong oleh industrialisasi dan modernisasi yang berdampak pada pergeseran gaya hidup (*life style*) perempuan Indonesia, terutama perempuan di kawasan kota. Prostitusi adalah entitas yang hadir sebagai residu sosial industrialisasi dan modernisasi yang berlangsung masif di kota-kota besar, khususnya di Jawa dan Sumatera. Berbagai hasil studi yang membahas tentang irisan antara industrialisasi, modernisasi, dan prostitusi mengonfirmasi bahwa fenomena prostitusi adalah residu sosial dari proyek industrialisasi dan modernisasi kota. Ia akan selalu muncul dan eksis di wilayah perkotaan dengan *traffic* sosial ekonomi yang padat. Kehidupan kota yang penuh sesak, individual, liberal, konsumtif, dan kompetitif telah memantik *side effect*-nya sendiri, seperti kriminalitas, kemiskinan, urbanisasi,

pengangguran, premanisme, hingga ke bisnis *esek-esek* yang menyatu secara integral sebagai ‘beban hidup kota’.

Ruang hidup masyarakat kota secara historis telah diisi oleh trajektori industrialisasi praktik prostitusi dalam bingkai sejarah kapitalisme-kolonial yang sukses mengeliminasi nilai-nilai tradisional yang berciri lokalis, statis, dogmatis, dan komunal sekaligus melahirkan nilai-nilai baru yang berciri rasional, individual, liberal, transaksional, konsumtif, padat modal, dan *well technologies*. Berbagai ciri kapitalisme yang banal itu menyatu dalam ‘wajah ambigu modernitas kota’. Dengan kata lain, praktik prostitusi adalah implikasi residual dari anomali ornamen sosial yang menyatu dalam ruang hidup modernitas kota.

Kendati ekosistem dunia prostitusi di Indonesia akan selalu bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial, aturan hukum, dan syariat agama, namun aktivitas dan praktik prostitusi tetap eksis di Indonesia, baik di sentra-sentra pertumbuhan ekonomi maupun di ruang kumuh kota. Membiaknya praktik prostitusi disebabkan oleh faktor kompleksitas kehidupan kota. Sulitnya mencari pekerjaan, disparitas kepemilikan modal sosial, pendidikan yang rendah atau ketiadaan keterampilan kerja (*unskilled worker*) dari para ‘pejuang rupiah desa’ (kaum urban) kerap menjadi argumen dari faktor penyebab maraknya praktik prostitusi. Prostitusi yang terus membiak—hingga ke era prostitusi online saat ini—adalah sebuah fakta empirik dari kegagalan negara dan kebijakan tata kelola kota yang ‘bias perempuan’.

KESIMPULAN

Eksistensi dan pertumbuhan prostitusi di Indonesia dimulai sejak masa feodalisme, kapitalisme-kolonial, masa kemerdekaan, hingga ke masa prostitusi online saat ini. Di masa feodal, perempuan diposisikan secara mitologis dalam sistem sosial dan format budaya patriarki. Konstruksi mitos tentang perempuan pada awalnya ‘bernilai positif’. Namun, ia mengalami pergeseran cara pandang: perempuan dilihat secara mitis sebagai ‘komoditas’ dan entitas subordinan dari sketsa besar kultur patriarki. Pemaknaan ini pada akhirnya membentuk stigma (nilai dominan) perempuan sebagai entitas subaltern: kelas marjinal yang sah untuk dijadikan obyek eksploitasi sekaligus *login* ke dalam arena publik sebagai obyek kapitalisasi (komodifikasi dan komersialisasi).

Hedonisme seks dalam sistem kekuasaan (*kasekten*) Jawa feodal cenderung disesaki oleh kisah-kisah mitologis: lelaki adalah makhluk *digdaya*, *sakti mandraguna*, dan jantan—memiliki *wisma* (tempat tinggal), *wanita* (isteri/selur/gundik), *turangga*

(kendaraan), *kukila* (hobi), dan *pusaka* (senjata; pekerjaan; kepandaian). Mitos ini terekam kuat dalam kisah *Serat Pararaton*, *Babad Tanah Jawi*, *Serat Centhini*, *Narasawan* atau *Kawruh Sanggama*. Epik yang banyak dibubuhi mitos itu menjadi sebuah konstruksi (citra) imajiner yang mampu mempengaruhi bawah sadar manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*), makhluk budaya (*homo ludens*), dan makhluk pekerja (*homo faber*). Konstruksi mitos itu telah sukses melegitimasi kontrol penuh budaya patriarki atas citra tubuh perempuan sebagai konstruksi citra yang menjadi penopang sistem kapitalisme-kolonial, pengganti sistem sosial feodal.

Di masa kapitalisme kolonial Belanda, komodifikasi dan komersialisasi perempuan subaltern masih berlangsung dalam ciri marjinalisasi dan eksploitasi ‘setengah hati’ (baca: perempuan hanya sebagai pelayanan seks rezim kolonial). Adanya supremasi nilai dari cita-cita rasionalisme, humanisme, dan liberalisme Eropa membuat rezim kolonial Belanda masih memosisikan pelacur sebagai subyek hukum yang harus dilindungi. Sementara di masa pendudukan Jepang (1942-1945), komodifikasi dan komersialisasi perempuan berlangsung lebih sadis dan brutal. Cara pandang rezim fasisme Jepang yang *chauvinistik* melihat perempuan di negeri jajahan tak hanya sebatas obyek komodifikasi dan komersialisasi, namun lebih dari itu, sebagai *sexual slavery* (budak seks).

Ditelisik dari sisi subyektivitas internal (moralitas, kepribadian, orientasi seksual, dan nilai-nilai kultural), faktor eksternal (pendidikan, kondisi ekonomi, peluang kerja, dan faktor struktural lain, seperti ilegalitas status) praktik prostitusi sepertinya perlu mendapat kejelasan status dari negara. Pasalnya, PSK hingga kini terus berjuang melawan berbagai bentuk dehumanisasi: diskriminasi hukum, *gap* atas akses ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik, dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Masyarakat, hingga kini, masih memandang pelacur sebagai ‘pelanggar norma sosial’ yang mesti dihindari, dikucilkan, bahkan kerap diintimidasi dengan kekerasan fisik, verbal, sosial maupun kultural.

Padaahal, *sex worker* nyata telah menjadi profesi dan sumber penghasilan alternatif yang menghidupi sebagian besar perempuan—termasuk pelacur laki-laki (*gigolo*) dan waria (transgender). Bisnis ‘*esek-esek*’ ini, suka tidak suka, telah menjadi *buffer zone* bagi entitas perempuan subaltern yang hidupnya tersingkir dari struktur ekonomi padat modal (*capital insentive*) saat ini yang berciri kapitalistik. Di ranah akademis, industri prostitusi adalah fenomena yang selalu relevan untuk ditimbang dalam kajian ilmu sosial, terutama dalam mengurai problem subalternitas yang terus membelit posisi struktural perempuan, menegosiasi status hukumnya, meredefinisi posisi hukum (legalitas) profesinya, mengartikulasikan hak-hak sipil-politiknya, merepresentasikan hak-hak otonomi sosial-

budayanya, dan merekonstruksi keberadaannya sebagai bagian penting dari sektor ekonomi informal yang kontributif dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abalahin, A. J. (2003) Prostitution policy and the project of modernity: A comparative study of colonial Indonesia and the Philippines, 1850–1940. *Dissertation*. New York, Ithaca: Cornell University.
- Akhyat, A. (2006) The ideology of kampung: A preliminary research on coastal City Semarang. *Humaniora*, 18(1), 15-26. <https://doi.org/10.22146/jh.859>.
- Al Hikam, H. A. (2019, January 07) *Perputaran Uang di Bisnis Prostitusi RI Capai Rp 32 T? Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4374535/perputaran-uang-di-bisnis-prostitusi-ri-capai-rp-32-t>*.
- Anderson, B. R. O’G. (1991) “Professional dreams: Reflections on two Javanese classics”, in *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*, Ithaca, NY: Cornell University Press (pp. 271-298).
- Antariksa (2009, July 22) *Intelektual, Gagasan Subaltern, dan Perubahan Sosial*. Diakses dari <https://www.kunci.or.id/ulasan/intelektual-gagasan-subaltern-dan-perubahan-sosial-oleh-antariksa/>
- Ardana, S. E. (2017, March 02) *Serat Centhini dan Sejarah Pelacuran di Yogyakarta*. Diakses dari <https://www.perwara.com/2017/serat-centhini-dan-sejarah-pelacuran-di-yogyakarta/>
- Ardi, S. (2019, September 15) *Penelitian Sejarah di SMA: Pengalaman Guru*. Diakses dari <https://suciptoardi.wordpress.com/2019/09/15/penelitian-sejarah-di-sma-pengalaman-guru/>
- Baay, R. (2017) *Nyai dan pergundikan di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu.
- Benoit, C., et al. (2017) Sex workers as peer health advocates: Community empowerment and transformative learning through a Canadian program. *International Journal for Equity in Health*, 16(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12939-017-0655-2>.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990) *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah sosiologi pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bhabha, H. K. (2012) *The location of culture*. London: Routledge.
- Borg, W. R. , & Gall, M. D. (1989) *Educational Research: An Introduction*. Fifth Edition. New York and London: Longman.
- Djamal, M. (2015) *Paradigma penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Edlund, L., & Korn, E. (2002) A theory of prostituion. *Journal of Political Economy*, 110(1), 181-212. <https://doi.org/10.1086/324390>.
- Firman, T. (2017, January 15) *Jugun Ianfu, Budak Wanita di Masa Penjajahan Jepang*. Diakses dari <https://tirto.id/jugun-ianfu-budak-wanita-di-masa-penjajahan-jepang-cgZz>.
- El-Saadawi, N. (2011) *Perempuan dalam budaya patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El-Saadawi, N. (2002) *Perempuan dari titik nol*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Federici, S. (2012). *Revolution at point zero: Housework, reproduction and feminist struggle*. Oakland, CA: PM Press.

- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: An introduction*. Volume I. Translated by Robert Hurley. New York: Vintage.
- Frances, G. (2007) *Dutch culture overseas: Praktik kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Goffman E. (1963) *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Ginanjari, D. (2018, September 08) *Membongkar Industri Prostitusi*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/buku/01236978/membongkar-industri-prostitusi>.
- Hull, T. H. (2017) From concubines to prostitutes: A partial history of trade in sexual services in Indonesia. *Moussons*, Vol. 29 [Online PDF Version]. <https://journals.openedition.org/moussons/3771>.
- Hull, T. H., et al. (1997) *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- ilo.org (1998, October 10) *ILO Report on Sex Sector Receives Prestigious Publishing Prize at Frankfurt Book Fair*. In <https://www.ilo.org/resource/news/ilo-report-sex-sector-receives-prestigious-publishing-prize-frankfurt-book>.
- Ingleson, J. (1986) "Prostitution in Colonial Java". In David P. Chandler and M.C. Ricklefs (eds.) *Nineteenth and Twentieth Centuries Indonesia: Essays in Honour of Professor J.D. Legge, Southeast Asian Studies*. Clayton, Victoria: Monash University (pp 123-138).
- Izzati, F. F. (2020, May 09) *Akumulasi Kapital dan Perampasan Otonomi atas Tubuh Perempuan*. Diakses dari <https://indoprogress.com/2020/05/akumulasi-kapital-dan-perampasan-otonomi-atas-tubuh-perempuan/>
- Jones, G. W., et al. (1995) *Prostitution in Indonesia*. Working Papers in Demography Series. Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University.
- Kapur, R. (2001) Post-colonial economies of desire: Legal representations of the sexual subaltern. *Denve Law Review*, 4(78), 855-885.
- Kapur, R. (2014) *Sexual Subalterns, Human Rights, and the Limits of the Liberal Imaginary*. Diakses dari <https://www.opendemocracy.net/en/sexual-subalterns-human-rights-and-limits-of-liberal-imaginary/>
- Krishnadas, J. (2006) The sexual subaltern in conversations "somewhere in between": Law and the old politics of colonialism. *Feminist Legal Studies*, 14(1), 53-77. <https://doi.org/10.1007/s10691-006-9014-1>.
- kumparan.com (2017, January 23) *Mitologi Hedonis Seks Jawa*. In <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/mitologi-hedonis-seks-jawa/full>.
- kumparan.com (2019, January 10) *Sejarah Prostitusi di Indonesia: Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumpransains/sejarah-prostitusi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-zaman-kolonial/full>.
- Lim, L. L. (1999, August 19) *Sex Industry Assuming Massive Proportions in Southeast Asia*. Diakses dari <https://www.ilo.org/resource/news/sex-industry-assuming-massive-proportions-southeast-asia>.
- Mason, J. (2002) *Qualitative researching*. Second Edition. California, Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.

- Matanasi, P. (2017, July 18) *Sukarno & Para Pekerja Seks di Masa Pergerakan Indonesia*. In <https://tirto.id/sukarno-para-pekerja-seks-di-masa-pergerakan-indonesia-csQ7>.
- Matanasi, P. (2019, January 07) *Sejarah Prostitusi dan Para Hidung Belang Zaman Kolonial*. Diakses dari <https://tirto.id/sejarah-prostitusi-dan-para-hidung-belang-zaman-kolonial-dduU>.
- McCullagh, C. B. (1984) *Justifying historical descriptions*. New York: Cambridge University Press.
- Mustaqim, M. (2018, May 10) *Perempuan dan Kuasa Mitologi*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/muhamad6530/5af3e817bde5756f48287e63/perempuan-dan-kuasa-mitologi>.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019) *Sejarah Nasional Indonesia* (Edisi Pemutakhiran). Cetakan ke-7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakash, G. (1994) Subaltern studies as postcolonial criticism. *The American Historical Review*, 99(5), 1475-1490. <https://doi.org/10.1086/ahr/99.5.1475>.
- Rahmawati, S. (2011) Identitas perempuan yang terbelenggu dalam Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer: Subaltern dalam konstruksi sosial masyarakat tradisi. *Mabasan*, 5(2), 80-93. <https://doi.org/10.26499/mab.v5i2.212>.
- Saide, E. W. (1978) *Orientalisme*. Vol. 10. New York: Pantheon Books.
- Sarkar, D. N., & Kundu, K. (2018) The overlap spaces of alternative economy and subaltern businesses: A study of emigrant peddlers. *Journal of Economic Structures*, 7(30), 1-24. <https://doi.org/10.1186/s40008-018-0128-9>.
- Setiawan, R. (2018) Subaltern, politik etis, dan hegemoni dalam perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 13-25. <https://doi.org/10.22146/poetika.35013>.
- Setiawan, A. (2020, August 11) *Teks-teks Jawa tentang Perilaku Seks*. Diakses dari <https://historia.id/kultur/articles/teks-teks-jawa-tentang-perilaku-seks-Dpg/page/1>.
- Smith, B. J., & Woodward, M. (2016). Magico-spiritual power, female sexuality and ritual sex in Muslim Java: Unveiling the kesekten of magical women. *Taja: The Australian Journal of Antrhopology*, 27(3), 317-322. <https://doi.org/10.1111/taja.12140>.
- Spivak, G. C. (1988) "Can the Subaltern Speak?" In Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.) *Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana, IL: University of Illinois Press (pp. 271-313).
- Suud, M. (2019) The existing policy on prostitution in Indonesia: A retrospective evaluation. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 4-15. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v2i1.607>.
- sindonews.com (2019, Januari 13) *Nilai Perputaran Bisnis Prostitusi di Indonesia Capai Triliunan Rupiah*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1369974/13/nilai-perputaran-bisnis-prostitusi-di-indonesia-capai-triliunan-rupiah>.
- Susanto, B., & Supriatma, A. M. T. (1995) *ABRI: Siasat kebudayaan 1945-1995*. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino.
- Tampubolon, H. D. (2010, November 23) *Quick Money Lures Young Girls into Prostitution*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2010/11/23/quick-money-lures-young-girls-prostitution.html>.
- Toer, P. A. (2009) *Gadis Pantai*. Jakarta: Lentera Dipantara.

- Ulivia (2018) Mitologi kesenian Nini Thowong. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 16(1), 58-72. <https://doi.org/10.21831/imaji.v16i1.22265>.
- Usdi, D. G. Z. (2022, July 11) *Sejarah Nyai dan Pelacuran Bandung Pada Masa Kolonial*. Diakses dari <https://narasisejarah.id/sejarah-nyai-dan-pelacuran-bandung-pada-masa-kolonial/>
- Willette, J. (2013, Agustus 13) *Post-Colonial Theory: Frantz Fanon*. Diakses dari <https://arthistoryunstuffed.com/post-colonial-theory-frantz-fanon/>
- Yulianto, N. M. (2020) *Ilmu dan kapital: Sosiologi ilmu pengetahuan Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: PT. Kanisius.